

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap entitas pemerintah daerah, memiliki kewajiban dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja suatu pemerintah daerah pada tahun anggaran tertentu. Kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bermula dari amanat dalam UU nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Bentuk dan isi laporan keuangan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada tahun 2005, *cash towards accrual* diterbitkan KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah) dalam SAP. LKPP yang disusun terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Komitmen Pemerintah dalam upaya mewujudkan laporan keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam SAP ini, basis yang digunakan masih basis kas modifikasi, dan merupakan masa transisi dari *single entry* menuju *double entry*. Berdasarkan PP 24 tahun 2005 tersebut, Pemerintah Daerah masih diperkenankan untuk menggunakan basis kas modifikasi hingga lima tahun ke depan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Melalui SAP terbaru tersebut Pemda mulai tahun 2015 diwajibkan menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Adanya SAP menjadi era baru bagi perkembangan akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintah di Indonesia.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Surakarta disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Surakarta selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realitas pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Joko Pramono (2014), manfaat penerapan basis akrual antara lain, meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan, memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah. Penggunaan basis akrual ini dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih baik. Untuk menilai kinerja

Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Dari latar belakang yang sudah disampaikan, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga 2020 sehingga disusunlah karya tulis yang berjudul “ANALISIS RASIO KEUANGAN DINAS PARIWISATA KOTA SURAKARTA TAHUN 2019-2020

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu antara lain :

- 1) Apakah Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Surakarta tahun 2019-2020 sudah disusun sesuai PSAP?
- 2) Bagaimana rasio keuangan Dinas Pariwisata Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir berkaitan dengan rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui:

- 1) Kesesuaian laporan keuangan Dinas Pariwisata Kota Surakarta yang telah disusun dengan PSAP yang berlaku;
- 2) Mengetahui rasio keuangan Dinas Pariwisata Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga 2020;
- 3) Mengetahui kinerja Dinas Pariwisata Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga 2020 berdasarkan analisis rasio keuangan.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Fokus penulisan karya tulis ini adalah menganalisis Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Surakarta tahun 2019 dan 2020. Penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan melalui perhitungan rasio keuangan untuk membandingkan setiap tahun laporan keuangan dengan menggunakan beberapa rasio yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio kemandirian, dan lain-lain.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik akademis maupun praktis.

- 1) Manfaat Akademis Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai analisis rasio keuangan dan menambah pengetahuan baru dan mendorong penelitian bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.
- 2) Manfaat Praktis Bagi penulis karya tulis ini dibuat dalam rangka pengujian atas ilmu teori dan ilmu praktik yang didapatkan penulis selama perkuliahan. Bagi Dinas Pariwisata Kota Surakarta dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk ke depannya agar mungkin bisa lebih baik.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori terkait pembahasan topik dalam karya tulis ini. Teori-teori tersebut dijelaskan secara umum maupun terperinci.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terbagi menjadi dua subbab yaitu metode dan pembahasan. Dalam subbab metode, penulis menguraikan hal-hal apa saja yang dilakukan penulis untuk memperoleh data. Sementara itu dalam subbab pembahasan, penulis membahas terkait kualitas laporan keuangan Dinas Pariwisata Kota Surakarta tahun 2019 hingga 2020. Pembahasan diperoleh dari hasil analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Surakarta tahun anggaran 2019 hingga 2020 dan kemudian membandingkannya dengan teori-teori/materi yang diperoleh selama proses perkuliahan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan lainnya.

## BAB IV SIMPULAN

Bagian ini berisi kesimpulan yang ditarik oleh penulis atas analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga nantinya akan memberikan saran atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Surakarta.